



Kembali Wacanakan Pansus Aset

Nasdem Siap Jadi Pelopor

PONTIANAK—Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kalimantan Barat akan menjadi pendorong dan pelopor pembentukan panitia khusus (pansus) aset yang hampir sepanjang tahun selalu menjadi temuan BPK RI.

"Makanya kami mengawal dan membicarakan dari awal. Jangan sampai hanya wacana dan wacana. Di DPRD setidaknya ada 8 fraksi. Nasdem siap menjadi inisiatif dan pelopor dalam menuntaskan persoalan aset di Kalimantan Barat," ungkap ketua Fraksi Nas-

dem, Lutfi A. Hadi kemarin sesuai paripurna.

Apakah hanya wacana dan tidak takut masuk angin ? katanya dengan banyak fraksi memang agak sulit menyatakan berbagai pendapat. Namun ia optimis semua akan setuju karena wacananya menuntaskan soal aset secara gabling.

"Intinya tidak boleh ada lagi temuan," katanya. Menurut Lutfi kejernihan soal aset sebetulnya sangat penting untuk pemerintahan di Kalbar. Nasdem mendorong supaya aset tersebut segera diselesaikan demi kepentingan bersama. "Memang awalnya agak membingungkan. Kenapa

soal aset tidak tuntas-tuntas. Sudah seperti "penyakit" tahunan," ujarnya

Ia malahan mempertanyakan apakah soal aset ada keinginan pihak tertentu sengaja membiarkan mengambang sehingga selalu menjadi temuan BPK. Yang jadi tanda tanya dengan situasi seperti begitu, kenapa LHP Pemprov Kalbar hatrik WTP. "Namun itulah penilaian kinerja BPK RI," ungkap dia.

Politisi Nasdem ini menambahkan fraksinya siap mengawal dan menjadi tulang punggung pembentahan soal aset. Secara kasat mata ia belum mengetahui secara persis bagaimana

aset tersebut beriak dan berlarut. Seperti masalah di GOR, bekas Gedung Juang yang sekarang menjadi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kabaranya gedung juang sudah ditukargulirkan namun sampai sekarang belum ada titik terangnya.

"Belum lagi aset terbengkalai. Ini hendaknya harus dituntaskan. Kami berpendapat harus ada tahapan penyelesaian dengan membentuk secara baku pansus aset," katanya.

Mad Nawir dari Fraksi Perkasa (PPP+PKS) berharap pada LHP Keuangan Pemprov Kalbar tahun anggaran 2015 diharapkan tetap

mempertahankan WTP namun tanpa ada masalah soal aset. "Kalau bermasalah fraksi Perkasa mengusulkan segera dibentuk pansus aset. Kami akan bahas bersama fraksi lainnya," katanya kemarin.

Ia menjelaskan pembentukan pansus aset dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi politik dewan guna meningkatkan kinerja pemerintah. Diharapkan pansus aset dapat diterima secara jernih bukannya mencari kelemahan pemerintah daerah. "Akan tetapi memang untuk memberikan dukungan dan peran dewan dalam ikut menyelesaikan soal aset," ujar dia. (den)